

STATUS PELAPORAN KASUS GIGITAN, VAKSINASI DAN KEKEBALAN KELOMPOK YANG TERBENTUK PADA HEWAN PENULAR RABIES (HPR) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERSAMA KADER RABIES TAHUN 2017 & 2018

drh. Nur Hidayatullah¹, drh. Ernawati²

Medik Veteriner Muda ¹Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

²Direktorat Kesehatan Hewan

ABSTRAK

Setelah kembali menemukan kasus positif rabies setelah dinyatakan bebas dari rabies pada tahun 2014, Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mengendalikan rabies di wilayahnya. Untuk memutus sirkulasi dan penyebaran virus rabies, Provinsi Kalimantan Barat fokus terhadap program pengendalian pada populasi HPR melalui vaksinasi. Selain kurangnya ketersediaan vaksin, tantangan utama dalam melaksanakan program tersebut adalah kurangnya Sumber Daya Manusia. Pada Tahun 2017 dan 2018 dilakukan terobosan untuk menambah jumlah vaksinator dengan membentuk kader rabies yang berasal dari Bhabin kamtibmas dan Karang Taruna. Sebelum bertugas, para kader rabies telah mendapatkan pelatihan terkait vaksinasi rabies. Berdasarkan data dari Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2016 sebelum adanya kader rabies jumlah realisasi vaksinasi rabies mencakup 45.896 dari 184.950 ekor populasi HPR (24,8%). Kasus gigitan HPR yang dilaporkan sebanyak 1.189 kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan paska vaksinasi pada tahun 2016 dengan 302 sampel, 156 sampel diantaranya mendapatkan hasil sero positif (52%). Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 setelah adanya penambahan kader rabies, terdapat perubahan data yang diterima. Hal ini dikarenakan dengan penambahan SDM tersebut, sebaran petugas dan sosialisasi yang dilakukan meningkat sehingga meningkatkan sensitifitas surveilans berbasis kasus gigitan. Selain itu, cakupan vaksinasi juga mengalami peningkatan.

Menurut laporan tahun 2017 jumlah vaksinasi HPR mencakup 81.970 dari 188.518 ekor (43,4%). Kasus gigitan HPR yang terdeteksi sebanyak 2.091 kasus. Sebanyak 700 sampel darah diperiksa paska pelaksanaan vaksinasi memiliki hasil seropositive sebanyak 332 sampel (rata-rata seropositive 47% dengan kisaran 15-77% di masing-masing kabupaten/kota). Sedangkan pada tahun 2018, jumlah vaksinasi HPR mencakup 54.243 dari 189.122 ekor (29%). Kasus gigitan HPR yang terdeteksi sebanyak 3.584 kasus. Sebanyak 320 sampel darah diperiksa paska pelaksanaan vaksinasi memiliki hasil seropositive sebanyak 203 sampel (rata-rata seropositive 63% dengan kisaran 23-83% di masing-masing kabupaten/kota).

Sedangkan pada tahun 2018, jumlah vaksinasi HPR mencakup 54.243 dari 189.122 ekor (29%). Kasus gigitan HPR yang terdeteksi sebanyak 3.584 kasus. Sebanyak 320 sampel darah diperiksa paska pelaksanaan vaksinasi memiliki hasil seropositive sebanyak 203 sampel (rata-rata seropositive 63% dengan kisaran 23-83% di masing-masing kabupaten/kota).

Kata kunci: kader rabies, kasus gigitan HPR, pelaporan, cakupan vaksinasi, seropositive

PENDAHULUAN

Propinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 LU serta 3°05 LS serta di antara 108°0 BT dan 114°10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari

Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar keempat setelah pertama Irian Jaya (421.891 km²), kedua Kalimantan Timur (202.440 km²) dan ketiga Kalimantan Tengah (152.600 km²). Dilihat dari luas menurut Kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (35.809 km² atau 24,39 persen) kemudian diikuti Kapuas Hulu (29.842 km² atau 20,33 persen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km² atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya.

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podsolot merah kuning), yang meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar. Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh Dati II, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %. Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Setelah kembali menemukan kasus positif rabies setelah dinyatakan bebas dari rabies pada tahun 2014, Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan upaya pengendalian rabies di wilayahnya. Untuk memutus sirkulasi dan penyebaran virus rabies, Provinsi Kalimantan Barat fokus melakukan pengebalan pada populasi HPR melalui vaksinasi.

Beberapa tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan hal tersebut diantaranya adalah terbatasnya ketersediaan vaksin serta sarana pendukungnya baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD, masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama para pemilik HPR tentang pentingnya vaksinasi,

ketersediaan data estimasi populasi yang belum akurat, luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang melebihi luas Pulau Jawa serta minimnya jumlah petugas yang melaksanakan vaksinasi.

Berdasarkan letak wilayah, luas wilayah, Topografi, dan penggunaan tanah di Kalimantan Barat memberikan gambaran bahwa betapa luasnya wilayah Kalimantan Barat dan tidak sebanding dengan jumlah petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota. Petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota sangat kesulitan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil dalam pengendalian rabies terutama untuk melaksanakan sosialisasi dan vaksinasi rabies. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat dalam melaksanakan pengendalian dan pencegahan rabies di Kalimantan Barat. Pada tahun 2017 dan 2018 telah dilaksanakan perekrutan dan pelatihan kader rabies di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Para Kader Rabies tersebut menjalankan tugas sebagai vaksinator rabies dan menyampaikan informasi segala sesuatu tentang rabies (sosialisasi). Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja kader rabies tersebut dengan melakukan analisa data cakupan vaksinasi dan titer antibody.

MATERI DAN METODA

Materi

Data Vaksinasi rabies di Kalimantan Barat tahun 2016, 2017 dan 2018 dari Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.

Data surveilans titer antibody pasca vaksinasi rabies di Kalimantan Barat tahun 2017 dan 2018 oleh UPT Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat
Data surveilans titer antibody rabies pasca vaksinasi di Kalimantan Barat tahun 2017 dan 2018 oleh Balai Veteriner Banjarbaru

Metode

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengetahui status pelaporan kasus gigitan, vaksinasi dan kekebalan kelompok yang terbentuk pada hewan penular rabies di Provinsi Kalimantan Barat bersama kader rabies tahun 2017 dan 2018 adalah:

1. Pengumpulan data dari berbagai sumber kemudian melakukan pemilahan terhadap data tersebut dengan mengelompokkan menurut kualifikasinya
2. Menghitung pelaporan kasus dari tahun 2016 sampai dengan 2018.
3. Menghitung persentase vaksinasi HPR (kekebalan kelompok) pada tahun 2017 dan 2018
4. Menghitung persentase titer antibody rabies pasca vaksinasi tahun 2017 dan 2018.
5. Melakukan kajian terhadap hasil pelaporan kasus, jumlah vaksinasi dan pembentukan titer antibody rabies sebelum dan sesudah adanya kader rabies.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2016 sebelum adanya kader rabies jumlah realisasi vaksinasi rabies mencakup 45.896 dari 184.950 ekor populasi HPR (24,8%). Kasus gigitan HPR yang dilaporkan sebanyak 1.189 kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan paska vaksinasi pada tahun 2016 dengan 302 sampel, 156 sampel diantaranya mendapatkan hasil sero positif (52%).

Tabel 1. Hasil surveilans titer antibody rabies Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel	Hasil Uji		Persentase	
			Seropositif	Seronegatif	Seropositif	Seronegatif
1	Pontianak	52	28	24	54%	46%
2	Singawang	42	26	16	62%	38%
3	Kubu Raya	52	36	16	69%	31%
4	Mempawah	50	22	28	44%	56%
5	Bengkayang	50	24	26	48%	52%
6	Landak	52	28	24	54%	46%
7	Sambas	50	35	15	70%	30%
8	Sanggau	44	34	10	77%	23%
9	Sekadau	56	16	40	29%	71%
10	Melawi	47	7	40	15%	85%
11	Sintang	52	24	28	46%	54%
12	Kapuas Hulu	73	24	49	33%	67%
13	Ketapang	46	10	36	22%	78%
14	Kayong Utara	34	18	16	53%	47%
TOTAL		700	332	368	47%	53%

Sumber: UPT Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 2. Hasil surveilans titer antibody rabies Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel	Hasil Uji		Persentase	
			Seropositif	Seronegatif	Seropositif	Seronegatif
1	Sanggau	90	63	27	70%	30%
2	Sintang	41	28	13	68%	32%
3	Mempawah	15	10	5	67%	33%
4	sekadau	23	19	4	83%	17%
5	Landak	54	34	20	63%	27%
6	Melawi	13	3	10	23%	77%
7	Sambas	4	2	2	50%	50%
8	Ketapang	13	4	9	30%	70%

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel	Hasil Uji		Persentase	
			Seropositif	Seronegatif	Seropositif	Seronegatif
9	Kuburaya	8	2	6	25%	75%
10	Kapuas Hulu	35	23	12	66%	34%
11	Bengkayang	13	9	4	69%	31%
12	Kayong Utara	11	6	5	55%	45%
TOTAL		320	203	117	63%	37%

Sumber: UPT Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat

Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 setelah adanya penambahan kader rabies, terdapat perubahan data yang diterima. Hal ini dikarenakan dengan penambahan SDM tersebut, sebaran petugas dan sosialisasi yang dilakukan meningkat sehingga meningkatkan sensitifitas surveilans berbasis kasus gigitan. Selain itu, cakupan vaksinasi juga mengalami peningkatan.

Menurut laporan tahun 2017 jumlah vaksinasi HPR mencakup 81.970 dari 188.518 ekor (43,4%). Kasus gigitan HPR yang terdeteksi sebanyak 2.091 kasus. Sebanyak 700 sampel darah diperiksa paska pelaksanaan vaksinasi memiliki hasil seropositif sebanyak 332 sampel (rata-rata seropositif 47% dengan kisaran 15-77% di masing-masing kabupaten/kota).

Sedangkan pada tahun 2018, jumlah vaksinasi HPR mencakup 54.243 dari 189.122 ekor (29%). Kasus gigitan HPR yang terdeteksi sebanyak 3.584 kasus. Sebanyak 320 sampel darah diperiksa paska pelaksanaan vaksinasi memiliki hasil seropositif sebanyak 203 sampel (rata-rata seropositif 63% dengan kisaran 23-83% di masing-masing kabupaten/kota).

Secara Kuantitas dapat disampaikan bahwa hadirnya kader vaksinator dapat meningkatkan cakupan vaksinasi dimana pada tahun 2016 cakupan vaksinasi rabies di Kalimantan Barat hanya 24% dari total populasi HPR. Sedangkan pada tahun 2017 meningkat 19,4 %. Namun pada tahun 2018 cakupan vaksinasi mengalami penurunan menjadi 29%. Penurunan cakupan vaksinasi ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran yang mempengaruhi terhadap ketersediaan vaksin rabies.

Tabel 3. Populasi dan Vaksinasi HPR tahun 2018

No.	Kab/kota	Populasi HPR	Alokasi		Realisasi	
			APBN Prov	APBN Pusat	APBN Prov	APBN Pusat
1	Ketapang	9.869	2.000	-	1.977	-
2	Melawi	9.880	-	-	-	-
3	Sintang	10.357	2.500	2.250	2.500	2.248
4	Kapuas Hulu	14.230	-	3.000	-	2.972
5	Bengkayang	29.714	1.000	500	1.000	497

No.	Kab/kota	Populasi HPR	Alokasi		Realisasi	
			APBN Prov	APBN Pusat	APBN Prov	APBN Pusat
6	Sanggau	11.317	2.000	2.000	1.962	1.946
7	Sekadau	12.101	1.000	1.000	992	965
8	Landak	53.851	1.000	3.000	1.000	3.000
9	Mempawah	16.676	500	500	436	496
10	Singkawang	5.730	500	1.700	500	1.700
11	Pontianak	4.270	-	-	-	-
12	Kubu Raya	3.680	1.000	500	978	499
13	Kayong Utara	1.522	500	-	500	-
14	Sambas	5.925	500	500	212	373
15	Provinsi	-	-	50	-	-
TOTAL		189.122	12.500	15.000	12.057	14.696

Sumber: Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kalbar
 Secara Kualitas juga terjadi peningkatan kekebalan kelompok. Hal ini didukung dari hasil pemeriksaan titer antibody rabies. Pada tahun 2017 dilakukan pemeriksaan titer antibody terhadap HPR yang telah divaksinasi pada tahun 2017. Hasil dari pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata seropositive 63% dengan kisaran 23-83% di masing-masing kabupaten/kota, sedangkan pada tahun 2018 meningkat

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Setelah melibatkan kader rabies pada tahun 2017 dan 2018 telah terjadi peningkatan pelaporan kasus rabies, peningkatan cakupan vaksinasi, peningkatan kekebalan kelompok dan peningkatan titer antibody seropositive di Kalimantan Barat.
2. Dilakukan inventarisasi ulang setiap 1 tahun sekali untuk mengantisipasi apabila ada kader vaksinator yang dipindah tugaskan, terutama dari unsur kepolisian.
3. Penanggung jawab program rabies baik di Provinsi maupun kabupaten/kota perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh kader rabies.
4. Perlu dilakukan MoU antara Kader Vaksinator dengan dokter hewan setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner dikarenakan kader vaksinator tersebut telah melaksanakan tindakan medis dengan melakukan tindakan parenteral.
5. Perlu dilaksanakan refresher terhadap kader vaksinator agar dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja

DAFTAR PUSTAKA

- Norawigaswari, N. D., et al. 2018. Respons Imun Humoral Anjing Lokal Betina Umur Lebih dari Satu Tahun Pasca Vaksinasi Rabies. *Indonesia Medicus Veterinus* edisi Januari 2018
- Setiaji, G. dan Agustini, N.L.P., 2011. Kajian Respon Antibodi Rabies Pada Anjing Post Vaksinasi di Pulau Bali. *Buletin Veteriner, BBVet Denpasar* Vol. XXIII, No. 78, Juni 2011.
- Utami S. dan Sumiarso B., 2012. Tingkat dan Faktor Risiko Kekbalan Protektif terhadap Rabies pada Anjing di Kota Makassar, *Jurnal Veteriner* Maret 2012
- World Health Organisation. 1996. *Laboratory Techniques in Rabies*, Fourth Edition, Meslin F. X., Kaplan M.M & Koprowski H., eds. WHO, Geneva, Switzerland.